ETNOSIA:

JURNAL ETNOGRAFI INDONESIA

Volume x Issue x, Desember 2019

P-ISSN: 2527-9313, E-ISSN: 2548-9747

Politik Identitas Masyarakat Adat di Indonesia: Studi Kasus di Kabupaten Merauke ¹

Fransiskus Wuniyu¹, Hamka Naping², Sukri³, Achmad Zulfikar⁴, Sosiawaty⁵

¹ Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Indonesia. E-mail: flowuniyu@gmail.com

² Departemen Antropologi Universitas Hasanuddin, Indonesia. E-mail: hamka_naping@yahoo.com

³ Program Studi Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Indonesia. E-mail: sukripolitik@gmail.com

⁴ Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Fajar, Indonesia. E-mail: apa@kabarfikar.com

⁵ Program Studi Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Indonesia. E-mail: sosiawatymasrul@gmail.com

¹ Naskah ini sedang dalam proses review di **Etnosia: Jurnal Etnografi Indonesia** dengan nomor *submission*: # 7759 pada 25 September 2019. Dipublikasikan dalam bentuk *pre-prints* untuk mendapatkan masukan publik.

ARTICLE INFO

Keywords:
Identity Politics;
Indigenous People;
Representation; Marind
Ethnic Group

How to cite:

...

DOI:

...

ABSTRACT

The research aimed at investigating identity politics and representation, and the implication of the identity politics and representation of Marind ethnic group in the Regional People's Representative Council of Merauke Regency. This research used the qualitative descriptive method. The research result indicates that the identity politics of Marind ethnic group occurs because the condition of Marind ethnic group is increasingly marginalized, many exploitations on the land based on faith as the indigenous ethnic group and customary territory owners at Merauke Regency. The identity politics of Marind ethnic group occurs mostly based on the ethnicity, not based on the religion and gender. In the identity politics of Marind ethnic group, there is also the elites' involvement namely the customary elites and government elites, while the religious elites are not involved. The demand representation of Marind ethnic group is based on the Special Autonomy Acts of the Article 38 verse 3, Article 6 verse 4 and verse 2. The representation of Marind ethnic group regarding their interests and necessities cannot be fought for by their representatives in the Regional People's Representative Council. The impact of the identity politics is the formation the new electoral district in the electoral district of Merauke Regency which is specialized for the indigenous community. Marind ethnic group has comprehended and understood politics. Moreover, the representation of the necessities and interests of Marind ethnic group has been responded and accommodated.

Copyright © 2019 ETNOSIA. All rights reserved.

1. Introduction

Masyarakat suku Marind, adalah salah satu suku yang memiliki hak wilayah di Kabupaten Merauke, jumlah penduduk suku Marind 40.678 jiwa dari jumlah total penduduk 213.484 jiwa Kabupaten Merauke (BPS Kabupaten Merauke, 2013). Dahulu jumlah suku Marind bila digabungkan secara keseluruhan dengan suku-suku lain di Provinsi Papua, melebihi jumlah masyarakat non Papua (pendatang), akan tetapi sekarang menjadi hal yang terbalik pada saat transmigrasi di buka di Kabupaten Merauke, mayoritas suku Marind berubah menjadi minoritas. Dominasi non Papua (pendatang) terhadap suku Marind menyebabkan disintegrasi suku Marind di berbagai sektor kehidupan yang menyebabkan timbulnya gerakan-gerakan politik identitas, Politik identitas bisa dikatakan terjadi di setiap kelompok atau komunitas, Menurut Cressida Heyes (Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2007) mendefinisikan politik identitas sebagai penandaan aktivitas politis dalam pengertian yang lebih luas dan teorisasi terhadap ditemukannya pengalaman-pengalaman ketidakadilan yang dialami bersama anggota-anggota dari kelompok-kelompok sosial tertentu.

Adanya gerakan politik identitas suku Marind terpicu pada hasil Pemilu legislatif 2014 dimana jumlah suku Marind yang terpilih adalah 5 orang, 5 orang suku Marind yaitu Daniel Walinaulik yang memperoleh 538 suara, Kanisia Mekiuw dengan 917 suara, Tarsisius Awi dengan 758 suara, Hengki Ndiken dengan 634 suara dan Fransiskus Warwuru dengan 404 suara (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke, 2014). Suku Marind menganggap bahwa Keterwakilannya di DPRD Kabupaten Merauke dengan hanya 5 orang tidak sesuai dengan semangat UU Nomor 21 Tahun

2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Bagi Provinsi Papua, terkait dengan politik yaitu pada Pasal 28 ayat (3) dijelaskan bahwa rekrutmen politik oleh partai politik di Provinsi Papua dilakukan dengan memprioritaskan masyarakat asli Papua, selain itu pada Pasal 6 ayat (2) Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) terdiri atas anggota yang dipilih dan diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan ayat (4) Jumlah anggota DPRP adalah $1\frac{1}{4}$ (satu seperempat) kali dari jumlah anggota DPRD Provinsi Papua sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (UU No 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua). Fenomena tersebut menyebabkan timbulnya berbagai aksi-aksi demonstrasi menentang pemerintah, menuntut agar pemerintah mendengar aspirasi-aspirasi mereka.

Tuntutan masyarakat suku marind secara tidak langsung dapat mempengaruhi stabilitas politik. Saat stabilitas masyarakat asli terkoyak maka sudah dipastikan stabilitas politik lokal akan koyak. Bailusy (2012) menyatakan bahwa potensi terganggunya stabilitas politik lokal sangat mungkin terjadi jika terjadi pertikaian diantara para elit politik. Hal ini juga didukung hasil penelitian dari Setyaningrum (2005), Syukur (2011), Haboddin (2012), Kholiq (2013), Kambo (2015), Kristianus (2016) serta Sosiawaty, Bailusy dan Kambo (2017).

Dalam penelitian ini, kekuatan-kekuatan primordial suku Marind nampaknya menjadi kekuatan politik yang sengaja dimainkan, sehingga dapat mempengaruhi aktivitas politik di tingkat lokal. Hal ini dilakukan karena banyak terjadi ketimpangan-ketimpangan dan termasuk tentang keterwakilan mereka di Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Merauke.

2. Method

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Denzin dan Lincoln adalah, "Penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada". Penelitian dengan analisis kualitatif bertujuan untuk menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang atau perilaku yang di amati lalu dianalisis. Pada penelitian ini suatu realitas atau obyek tidak dapat dilihat secara persial dan dipecah dalam beberapa variabel. Penelitian kualitatif memandang obyek sebagai suatu yang dinamis, hasil konstruksi pemikiran yang utuh (holistic) karena setiap aspek dari obyek itu mempunyai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Lokasi penelitian adalah tempat berlangsungnya kegiatan penelitian yang dilakukan. Lokasi penelitian bisa berupa sebuah wilayah geografis tertentu atau bisa juga dalam sebuah lembaga sosial di masyarakat. Adapun yang menjadi tempat penelitian adalah Kabupaten Merauke. Peneliti mengambil lokasi penelitian di Kabupaten Merauke karena, terlihat adanya fenomena politik identitas yang terjadi, Di Indonesia, politik identitas tidak hanya terjadi ditingkat nasional, namun politik identitas tersebut juga terjadi di tingkat lokal salah satunya terjadi di Kabupaten Merauke. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Kabupaten Merauke.

Fokus penelitian yaitu Politik Identitas, Keterwakilan dan Implikasi Suku Marind di DPRD Kabupaten Merauke. Dalam penelitian ini pihak yang dijadikan sumber data adalah melalui wawancara dari informan dan Data Umum (Sekunder), Data Khusus (Primer). Dalam penelitian ini pihak yang dijadikan informan adalah

Kepala KPU dan Komisioner KPU Merauke, Ketua LMA, Masyarakat Pendatang dan Masyarakat Marind.

Untuk menghindari temuan yang subjektif, penelitian kualitatif menggunakan bermacam sumber data. Denzin dan Lincoln menjelaskan bahwa sumber data yang dipergunakandiantaranyaadalahcatatanlapangan, wawancara, percakapan, foto, rekaman dan berbagai artefak, dokumenatauarsip yang terdapat dilapangan. Setiap sumber data tersebutdisalingsilangkan agar data yang diperoleh dapat dipercaya (*valid*) dan sesuai dengan kebutuhan (reliabel).

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan bekerja pada data, mengorganisasi data, memilah.milahnya menjadi satuan yg dapat dikelola, menyintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Analisis deskriptif dilaksanakan melalui tiga alur kegiatan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Tiga alur kegiatan ini adalah (1) Klasifikasi data, (2) Agregasi data, dan (3) Menyusun pertanyaan pokok. Dari tiga alur ini diharapkan dapat membuat data menjadi bermakna.

3. Results and Discussion

Politik Identitas

Andrew Heywood (2007) menjelaskan, bahwa identitas berfungsi menghubungkan aspek pribadi dengan aspek sosial sehingga individu 'tertanam' dalam konteks partikular dari budaya, sosial, institusi dan ideologi. Dengan begitu, identitas individu dapat dimunculkan secara sosial dengan bermacam-macam faktor seperti kesukuan, keagamaan, gender, kewarganegaran dan lain sebagainya kedalam politik.Politik identitas bisa dikatakan terjadi di setiap kelompok atau komunitas, Menurut Cressida Heyes (Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2007) mendefinisikan politik identitas sebagai penandaan aktivitas politis dalam pengertian yang lebih luas dan teorisasi terhadap ditemukannya pengalaman-pengalaman ketidakadilan yang dialami bersama anggota-anggota dari kelompok-kelompok sosial tertentu. Dalam hal ini Cressida Heyes beranggapan jika politik identitas lebih mengarah kepada kepentingan terhadap individu atau kelompok yang terpinggirkan dari pada pengorganisasian.

Agnes Heller mengambil definisi politik identitas sebagai konsep dan gerakan politik yang fokus perhatiannya adalah perbedaan (*difference*) sebagai suatu kategori politik yang utama (Abdilah S, 2002: 16). Di dalam setiap komunitas, walaupun mereka berideologi dan memiliki tujuan bersama, tidak bisa dipungkiri bahwa di dalamnya terdapat berbagai macam individu yangmemiliki kepribadian dan identitas masing-masing. Hal ini dikarenakan kepribadian dan identitas individu yang berbeda dan unik, sangat mungkin terjadi dominasi antar individu yang sama-sama memiliki ego dan tujuan pribadi.

Dalam politik identitas tentu saja ikatan kesukuan mendapat peranan penting, ia menjadi simbol-simbol budaya yang potensial serta menjadi sumber kekuatan untuk aksi-aksi politik (Kemala, 1989). Simbol-simbol budaya ini dapat berupa bahasa maupun pakaian yang mencirikan budaya dan etnis tertentu. Identitas dapat dijadikan untuk kepentingan elit dan sarana kekuasaan yang memungkinkan terjadi penguatan politik identitas di satu pihak dan juga melemahkan pihak lain. Kekuatan-kekuatan primordial di tingkat lokal telah menjelma menjadi kekuatan politik yang terus

direproduksi dan dimainkan oleh elit sehingga mampu mempengaruhi aktivitas politik di tingkat lokal (Palungan & Setyanto, 2009: 380).

Politik identitas yang dilakukan ini karena suku Marind merasa keadaan mereka semakin terpinggir dari segala aspek kehidupan yang telah merubah cara pandang mereka dengan kelompok masyarakat suku lain, lebih khusus kepada masyarakat pendatang, dimana masyarakat suku Marind merasa kehidupan mereka yang semakin susah ditempatnya sendiri, lapangan pekerjaan semakin sulit mereka dapatkan baik sektor swasta atau pemerintah, pembangunan yang lebih dominan kepada daerah transmigrasi ketimbang daerah lokal, hal ini juga sama dengan definisi dari Agnes Heller yang melihat politik identitas sebagai konsep dan gerakan politik yang fokus perhatiannya adalah perbedaan (*difference*) sebagai suatu kategori politik yang utama (Abdilah S, 2002: 16), disini jelas masyarakat suku Marind menilai adanya perbedaan perlakuan atas pembangunan di kedua daerah yaitu antara daerah transmigrasi dan daerah lokal. Dilain sisi pembukaan lahan-lahan baru bagi transmigrasi yang tidak melalui ijin dari masyarakat adat suku Marind. Tuntutan masyarakat Marind merupakan bagian dari politik lokal yang menginginkan adanya perlakuan unik terhadap lokalitas mereka dan kemungkinan untuk adanya realisasi atas hak-hak sosial politik, ekonomi kultural, dan juga identitas diri, yang hanya bisa dicapai jika ada penerimaan dan perlindungan atas identitas etnis mereka.

Jika menilik pendapat Brubaker (dalam Ishiyama & Marijke Breuning, 2013: 363) bahwa identitas etnis adalah salah satu kekuatan besar yang membentuk sikap politik dan perilaku politik massa, dalam konteks ini dapat dilihat bahwa sikap politik yang ditunjukkan oleh masyarakat Suku Marind terbentuk karena adanya

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi suku Marind tersebut yang kemudian dijadikan rangkaian dalam masalah yang dibawa kedalam bentuk politik identitas suku Marind tersebut. hal ini dilakukan karena suku Marind merasa bahwa Pemerintah Daerah (PEMDA) Kabupaten Merauke tidak merespon semua yang dituntut oleh suku Marind tersebut, sehingga hal-hal tersebut menjadi alasan mengapa gerakan politik identitas tersebut dilakukan. Hal ini puncaknya dilakukan setelah hasil pileg tahun 2014 lalu dimana keterwakilan mereka yang terpilih hanya lima orang, suku Marind merasa bahwa dengan lima orang ini kurang bagi suku Marind tersebut dan tidak sesuai dengan UU otsus. Keterpinggiran, eksploitasi dan keterwakilan dirangkai menjadi satu dan dilakukan atau digerakan dalam bentuk politik identitas yang dilakukan oleh suku Marind.

Kekuatan-kekuatan primordial di tingkat lokal telah menjelma menjadi kekuatan politik yang terus diproduksi dan dimainkan oleh elit sehingga mampu mempengaruhi aktivitas politik di tingkat lokal (Palungan & Setyanto, 2009: 380). Hal ini juga sama yang terjadi masyarakat suku Marind, dimana kekuatan-kekuatan primordialisme menjadi dasar atas politik identitas yang terjadi di Merauke. Selain itu menurut ahli politik Andrew Heywood (2007) menjelaskan, bahwa identitas berfungsi menghubungkan aspek pribadi dengan aspek sosial, dimana aspek-aspek sosial ini digerakan kedalam politik dengan bermacam-macam faktor seperti kesukuan, keagamaan dan gender.

1. Kesukuan

Menurut Andre Heywood bahwa politik identitas muncul dari berbagai aspek dimana aspek individu menghubungkan aspek sosial sehingga individu tertanam dalam konteks partikular dan budaya, sosial, institusi dan ideologi. Dengan begitu

identitas individu dapat dimunculkan secara sosial kedalam bentuk politik dengan bermacam-macam faktor seperti kesukuan, keagamaan dan gender. Ini berarti aspek kesukuan dalam politik identitas sangat kental akan terjadi dimana kesukuan menjadi landasan utama setiap kelompok orang/suku dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Politik identitas suku Marind di Kabupaten Merauke, telah didasarkan pada keyaninan sebagai orang asli/suku asli yang mempunyai hak-hak atas wilayahnya di Kabupaten Merauke. Masyarakat Marind yang dulunya mayoritas sekarang menjadi minoritas, lapangan pekerjaan yang susah dan semua sendi-sendi kehidupan yang dipegang oleh masyarakat pendatang mengakibatkan suku Marind menjadi susah diatas tanahnya sendiri.

Kentalnya politik identitas yang dilatarbelakangi oleh ikatan kesukuan yang kuat, bisa menjadi besar jika tidak diatasi dengan cepat. Seperti halnya dengan ikatan kesukuan suku Marind yang dimanifestasikan kedalam bentuk politik identitas tersebut. Hal ini sejalan dengan teori dari Andrew Heywood bahwa politik identitas terjadi dari aspek kesukuan, disini terlihat jelas dimana politik identitas suku Marind terjadi murni karena adanya ikatan-ikatan kesukuan yang kuat didalam suku Marind tersebut. Hal ini perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah Daerah (PEMDA) Kabupaten Merauke, sebab gerakan politik identitas yang dilatarbelakangi oleh ikatan kesukuan seperti suku Marind ini memiliki ikatan-ikatan yang kuat dan sewaktu-waktu bisa berubah menjadi kekuatan-kekuatan yang besar dan bisa mempengaruhi kestabilan politik khususnya di Kabupaten Merauke dan sekitarnya.

2. Keagamaan

Masyarakat Kabupaten Merauke yang sudah bercampur dengan masyarakat pendatang, yang memiliki multi ras dan multi agama, memiliki potensi yang besar untuk terjadinya konflik antar kelompok, ras, dan agama. Indikasi ke arah itu terlihat dari semakin susah nya masyarakat asli khususnya suku Marind diatas tanahnya sendiri dengan kelompok lainnya yang berjuang dan bertindak atas nama kepentingan kelompoknya atau kepentingan lainnya. Keyakinan agama yang berbeda dapat memicu konflik politik identitas yang berlatar belakang agama. Kabupaten Merauke yang notabenen masyarakatnya dahulu beragama Kristen dan katolik yang sekarang telah menjadi minoritas dengan agama Islam telah membawah banyak perubahan dari berbagai sisi kehidupan termasuk politik. Daerah lain di Indonesia politik identitas yang bercorak agama lebih dominan dan bahkan sangat berakibat fatal jika diterapkan, lain halnya di Kabupaten Merauke, Merauke yang digagas oleh pendahulunya yaitu Merauke sebagai gerbang damai di Indonesia timur telah memberikan jaminan kehidupan beragama bagi banyak orang yang datang ke Kabupaten Merauke. Kehidupan beragama di Kabupaten Merauke sangat harmonis dan dimanis.

Politik identitas memang kerap terjadi di Indonesia dan selalu dijadikan oleh elite untuk menjatuhkan lawan politiknya. Politik identitas yang dilakukan oleh suku Marind tersebut tidak ada unsur atau isu agama. Hal ini berbeda dengan teori dari ahli ilmu politik Andrew Heywood (2007) yang melihat aspek sosial yang sengaja dihubungkan dengan politik seperti suku, agama dan gender, dimana gerakan politik identitas suku Marind tersebut bisa dilatar belakangi oleh agama. Masyarakat suku Marind secara sadar menyatakan dan melakukan gerakan-gerakan politik identitas yang menuntut keterwakilannya tanpa digandengkan dengan unsur-unsur agama. Hal demikian menandakan bahwa tidak semua realitas kehidupan politik tidak selalu sejalan dengan teori seperti halnya teori yang disampaikan oleh Andrew Heywood

tersebut.

3. Gender

Kata gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin. Menurut Cixous dalam Tong (2004:41), gender diartikan sebagai “perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan yang dilihat dari segi nilai dan tingkah laku”. Sedangkan menurut Kristeva dalam Tong (2004:42) dijelaskan bahwa gender adalah “suatu konsep cultural yang merujuk pada karakteristik yang membedakan antara laki-laki dan perempuan baik secara biologis, perilaku, mentalitas, dan social budaya”. Gender merupakan aturan atau norma perilaku yang berhubungan dengan jenis kelamin dalam suatu sistem masyarakat, karena gender sering kali diidentikkan dengan jenis kelamin atau seks. Dalam politik identitas suku Marind sebenarnya gender tidak dipermasalahkan, yang intinya dari tuntutan masyarakat Marind adalah adanya keterwakilan mereka sesuai dengan pasal 6 ayat 4 yaitu jumlahnya 1 ¼ harus ada di DPRD Kabupaten Merauke. Karena bagi suku Marind siapapun dia baik laki-laki maupun perempuan semuanya sama, yang terpenting adalah bagaimana mereka yang mewakili masyarakat suku Marind ini benar-benar dapat bekerja, membangun dan melayani khususnya masyarakat suku Marind

Dari permasalahan politik identitas yang dihadapi oleh suku Marind, sebenarnya suku Marind tidak mempersoalkan secara keseluruhan. Hal yang menjadi permasalahan dalam politik identitas yang diperjuangkan oleh suku Marind adalah dari aspek kesukuan, dimana dalam pandangan suku Marind, mereka melihat banyak terjadi ketimpangan-ketimpangan yang merugikan suku Marind tersebut. Dengan demikian bahwa tidak semua teori dapat menjawab semua permasalahan dilapangan, seperti pandangan Andrew Heywood (2007) tentang aspek sosial yang dibawa kedalam politik seperti kesukuan, keagamaan dan gender. Dari ketiga aspek tersebut hanya satu yang satu aspek yang sesuai dengan teori dari Andrew Heywood tersebut, politik identitas suku Marind lebih kepada aspek kesukuan.

Perilaku Politik Identitas Suku Marind

Secara umum perilaku politik dirumuskan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan keputusan politik (Surbakti, 1992:131). Perilaku politik juga termasuk kegiatan masyarakat dalam proses meraih kekuasaan, mempertahankan kekuasaan, serta mengembangkan kekuasaan. Atau dengan rumusan lain perilaku politik adalah semua perilaku manusia baik sebagai individu maupun masyarakat yang berkaitan dengan proses pembuatan kebijakan, konflik, kebaikan bersama, serta kekuasaan.

Menurut Sitepu (2012:88) perilaku politik dapat dirumuskan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik dan yang melakukan kegiatan politik tersebut adalah pemerintah dan masyarakat. Perilaku politik dapat dibagi ke dalam dua bagian pokok yakni: pertama, perilaku politik lembaga-lembaga dan pejabat pemerintah, kedua, perilaku politik warga negara biasa (baik sebagai individu maupun kelompok).

Secara umum perilaku politik dirumuskan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan keputusan politik (Surbakti, 1992:131). Perilaku politik juga termasuk kegiatan masyarakat dalam proses meraih kekuasaan, mempertahankan kekuasaan, serta mengembangkan kekuasaan. Atau dengan rumusan lain perilaku politik adalah semua perilaku manusia baik sebagai individu maupun masyarakat yang berkaitan dengan proses pembuatan kebijakan, konflik, kebaikan bersama, serta

kekuasaan. Sejalan dengan pengertian politik, perilaku politik berkenaan dengan tujuan suatu masyarakat, kebijakan untuk mencapai suatu tujuan, serta sistem kekuasaan yang memungkinkan adanya suatu otoritas untuk mengatur kehidupan masyarakat kearah pencapaian tujuan tersebut. Perilaku politik masyarakat suku Marind yang dilandasi karena keyakinan sebagai penduduk asli yang menginginkan adanya sebuah perubahan terkait dengan keterwakilannya di DPRD. Hal ini dilakukan karena masyarakat Marind meyakini bahwa keterwakilan mereka masih kurang dan tidak sesuai dengan undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus, yang didalam pasal 6 ayat 4 yaitu harusnya diberlakukan $1 \frac{1}{4}$ kali dari jumlah total anggota DPRD.

Perilaku politik suku Marind sengaja dilakukan karena beberapa faktor yaitu terjadinya, ketimpangan-ketimpangan dalam kehidupan seperti lapangan pekerjaan yang semakin sempit, hak-hak dasar masyarakat suku Marind yang telah dikuasai, keadaan-keadaan ini memaksa masyarakat Marind harus membuat keputusan yang dengan berbagai aksi-aksi terkait dengan masalah-masalah tersebut, hal ini juga sejalan dengan lingkungan sosial politik yang tak langsung berupa situasi yaitu keadaan-keadaan yang mempengaruhi masyarakat secara langsung hendak melakukan suatu kegiatan untuk membelah haknya (Surbakti, 1992:133). Hal lainnya adalah tentang keterwakilannya di DPRD yang dianggap kurang dari kuota yang diatur dalam undang-undang no 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus pasal 6 tentang keterwakilan, maka Masyarakat suku Marind menuntut kepada pemerintah Kabupaten Merauke harus dapat mengakomodir tuntutan mereka tersebut.

a. Penduduk Asli

Perilaku politik yang dilakukan oleh suku Marind sebenarnya karena adanya unsur sebagai penduduk asli dan ingin menjadi tuan atas negerinya sendiri. Banyak hal yang menjadi alasan mengapa masyarakat suku Marind melakukan aksi-aksi dalam gerakan politik identitas, salah satunya adalah tentang jumlah anggota DPRD suku Marind yang menurut mereka bahwa keterwakilannya masih kurang di DPRD tersebut, hal ini dituntut karena merasa bahwa mereka adalah penduduk asli yang harus memiliki perwakilan di DPRD.

Perilaku politik yang mencerminkan identitas diri adalah tindakan yang biasanya dilakukan oleh sekelompok orang masyarakat yang merasa termarginalisasi dan semakin terpinggir. Masyarakat Marind dengan keadaan yang semakin terpinggir memaksanya harus bertindak dan lebih aktif dalam berbagai bidang kehidupan termasuk politik, disini masyarakat Marind dihadapkan dengan masalah keterwakilan mereka sebagai penduduk asli yang seharusnya memiliki kuota yang lebih. Hal tersebut mengakibatkan masyarakat Marind merasa tidak puas dengan keterwakilan mereka, yang harusnya disesuaikan dengan undang-undang No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua. Mereka juga menuntut hak-hak mereka sebagai penduduk asli kabupaten Merauke yang harus di perhatikan oleh pemerintah.

b. Wilayah Adat

Selain merasa sebagai penduduk asli, perilaku masyarakat Marind juga mengatas namakan sebagai penduduk yang mempunyai wilayah adat atas wilayah kabupaten Merauke. Kegiatan atau aksi yang dilakukan oleh suku Marind tersebut karena melihat banyak terjadi ketimpangan-ketimpangan dan melihat banyak wilayah adat yang menjadi taruhan karena proses politik.

Dari berbagai wawancara dapat disimpulkan bahwa, Gerakan yang dilakukan oleh masyarakat suku Marind tersebut yaitu melihat adanya kesamaan hak atas dasar mereka sebagai penduduk asli dan sebagai pemilik wilayah Kabupaten Merauke, sehingga perlu adanya keterwakilan mereka di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Merauke sesuai dengan yang tertera dalam undang-undang no 21 tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi provinsi Papua, seperti dengan apa yang disuarakannya. Perilaku politik yang dilakukan oleh suku Marind tersebut yang dilatarbekangi sebagai usaha-usaha untuk menuntut adanya keterwakilan mereka di DPRD. Dengan gerakan yang mereka lakukan tersebut dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat suku Marind dalam konteks secara luas untuk memahami perkembangan-perkembangan yang sedang terjadi dalam ranah politik maupun yang lainnya.

Posisi Elit dalam Pengendalian Politik Identitas Suku Marind

Kelompok elite local sangat potensial sebagai agen pembaharuan, terutama dalam fungsinya sebagai jembatan antara kemauan pemerintah dan kepentingan masyarakat. Mereka yang termasuk elite local bukan hanya dari golongan governing elite, akan tetapi non-governing elite juga kerap tampil sebagai figure potensial dalam memobilisasi masyarakat, menyampaikan gagasan, keluhan dan permintaan anggota masyarakat (Ufford, 1988). Kekuasaan untuk mengambil keputusan tidak semata-mata oleh jabatan formal dari kedudukan elite. Akan tetapi elite diluar itu karena memiliki keunggulan dalam bentuk nilai-nilai yang mereka bentuk mendapat nilai tinggi dalam kehidupan masyarakat, juga sangat berperan. Nilai yang dibentuk dapat berupa kekuasaan, kejayaan, kehormatan, pengetahuan lain-lainnya. Dari sini individu-individu yang berhasil memiliki sebagian besar nilai-nilai tersebut menurut laswel, terlibat secara aktif dalam bidang pengambilan keputusan (Laswel dalam Haryono: 1990:16).

Keberadaan elite local saat ini juga sangat dipengaruhi oleh factor structural dan organisasional (Pareti dalam Bottomoro, 1985). Keberadaan Elite local pada masa kini meliputi mereka yang berada pada birokrasi pemerintah (governing elite) yaitu mereka yang dimasukkan sebagai kelompok elite karena menduduki jabatan penting dalam organisasi pemerintahan (bersifat formal). Elite semacam ini memiliki pengaruh dan kekuasaan karena mendapatkan legitimasi dari pemerintahan yang lebih atas (Supralokal). Disamping itu di dalam masyarakat berkembang juga kelompok elite diluar itu (Non governing elite), seperti para bangsawan, tokoh-tokoh adat dan agama yang mendapatkan legitimasi dari adat dan agama, orang kaya desa dan pegawai negeri. Mereka dikategorikan elite karena kapasitas personal, kemampuan dan pengetahuan adat dan agama yang dimiliki serta kekayaannya, sehingga dianggap memiliki kelebihan dan selalu menjadi panutan sikap dan kompas tindakan bagi masyarakat.

Kelompok elite sangat potensial sebagai agen pembaharuan, terutama dalam fungsinya sebagai jembatan antara kemauan pemerintah dan kepentingan masyarakat. Mereka yang termasuk elite local bukan hanya dari golongan governing elite, akan tetapi non-governing elite juga kerap tampil sebagai figure potensial dalam memobilisasi masyarakat, menyampaikan gagasan, keluhan dan permintaan anggota masyarakat (Ufford, 1988).

Aksi yang dilakukan oleh masyarakat suku Marind tersebut sengaja dipelopori oleh para elite yang sengaja memanfaatkan kondisi tersebut, hal tersebut menekankan

identitas suku Marind yang merupakan sesuatu yang dikonstruksikan untuk kepentingan elit dan lebih menekankan pada aspek kekuasaan (Widayanti, 2009: 14-15), dimana momentum tersebut digunakan elite untuk kepentingannya sendiri ketimbang kepentingan dari kelompok dengan mengatasnamakan suku Marind. Hal ini memang menjadi masalah dimana dalam hal ini banyak para elite yang sengaja memanfaatkan kondisi tersebut untuk mengambil hati masyarakat dan sekaligus mengasut masyarakat, untuk melakukan berbagai aksi mengenai keterwakilan mereka kepada pemerintah, diantaranya para elite yang memiliki peranan atau pengaruh yaitu:

a. Elite Adat

Elite adat adalah individu atau kelompok yang memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan dalam tingkat masyarakat adat dan memiliki pengaruh yang besar di kalangan masyarakat. Elite adat suku Marind memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam mempengaruhi masyarakat, dalam pengambilan kebijakan-kebijakan di tingkat lokal elite adat ini dapat mempengaruhi pengambilan ketusan tersebut misalkan dalam mempengaruhi masyarakat. Elite adat di Kabupaten Merauke sangat kental akan pengaruhnya. Perubahan dinamika kehidupan masyarakat Marind sendiri selalu dipengaruhi oleh para elite tersebut, elite adat ini memiliki pengaruh adat dan mendapatkan legitimasi dari adat (Pareti dalam Bottomoro, 1985).

Elite adat di Merauke masih saling menjatuhkan satu sama lain karena memiliki kepentingan yang berbeda pula, misalkan pada pilkada Merauke tahun 2015 lalu elite-elite yang memiliki pengaruh ini masing-masing membangun kekuatan-kekuatan politik yang kuat, dimana kekuatan-kekuatan politik ini sengaja dibentuk untuk mendukung pasangan calon yang didukungnya serta membangun koalisi untuk meraup suara masyarakat. Namun adapula yang beranggapan lain, bahwa perubahan politik identitas suku Marind tersebut, karena atas kesadaran masyarakat itu sendiri. Masyarakat Marind telah menyadari bahwa mereka telah mengalami perubahan dan kemunduran keterwakilannya di DPRD, sehingga perlu adanya usaha bersama masyarakat Marind dengan berbagai aksi protes kepada pemerintah. Masyarakat Marind melakukan gerakan dalam hal memperjuangkan aspirasi mereka itu semua karena kesadaran dan keinginannya, hal tersebut terjadi karena melihat keterwakilan mereka di DPRD yang tidak sesuai dengan pasal 6 ayat 4 yaitu harus 1/4 adalah masyarakat Marind.

b. Elite Agama

Keller, menyatakan bahwa elite agama pada suatu waktu merupakan pengadil tertinggi dari pikiran dan perbuatan manusia. Malah sampai kini pengaruh elite agama, walau tak langsung, tidak berhenti. Elite agama termasuk elite penentu karena mereka sama-sama bertanggung jawab untuk dapat bertahan bersama-sama. Dalam pembentukan gerakan politik identitas suku Marind sangat jelas dan tidak adanya campur tangan dari elite agama, dalam hal ini elite agama yang memiliki pengaruh dan mendapatkan legitimasi dalam masyarakat tidak bisa dikaitkan dengan politik identitas. Di daerah lain politik identitas lebih kepada adanya aktor atau elite agama, namun tidak untuk di daerah Merauke, karena elite agama di Kabupaten Merauke selalu saling menghargai dan menghormati antar sesamanya.

Elite agama di kabupaten Merauke selalu hidup saling berdampingan dengan umat dan saling menghormati dan menghargai antara sesama para tokoh agama lainnya. Dilapangan penulis melihat dengan jelas bahwa memang sebananya tidak ada

kaitannya politik identitas suku Marind tersebut dengan agama. Hal tersebut dilakukan atas dasar kesukuan dari suku Marind tersebut.

c. Elite Pemerintah

Elite pemerintah adalah mereka yang secara legal mengisi jabatan-jabatan strategis di pemerintahan baik legislatif maupun eksekutif. Keterlibatan elite pemerintah dalam politik identitas suku Marind sendiri lebih berpihak kepada kubu lawan dari masyarakat Marind. Seperti problem pergantian ketua DPRD kabupaten Merauke pasca meninggalnya Ketua DPRD sebelumnya, bahkan sebagai orang nomor satu di kabupaten Merauke pun tidak berpihak kepada masyarakat asli Marind, yang notabenen beliau adalah anak asli dari suku Marind tersebut.

Politik identitas atau gerakan yang dilakukan masyarakat Marind tersebut sebenarnya berawal dari pergantian ketua DPRD setelah meninggalnya Almarhum Kanisiuw Mekwiu. Pada saat itu masyarakat Marind meminta bahwa harus pergantian ketua DPRD tersebut harusnya orang Marind sendiri, tetapi hal ini tidak diperhatikan oleh pemerintah, sementara anehnya lagi pak mantan bupati sendiri sebagai anak asli Marind lebih mendukung dan orang lain untuk menjadi ketua DPRD. Dengan demikian masyarakat suku Marind menganggap bahwa para pejabat pemerintah lebih berpihak pada orang lain ketimbang pada suku Marind. Hal ini mengakibatkan masyarakat suku Marind berani untuk melakukan aksi-aksi tersebut, Namun pemerintah menjelaskan bahwa sebenarnya dalam hal ini pemerintah hanya sebatas mengakomodir aspirasi masyarakat suku Marind tersebut dan kalau ada elite pemerintah yang terlibat itu hanya secara individu dan tidak membawa nama lembaga pemerintah.

Keterwakilan Suku Marind di DPRD

Keterwakilan suku Marind di DPRD Kabupaten Merauke dengan hanya 5 orang tersebut mengakibatkan timbulnya pergerakan masyarakat suku Marind yang menuntut agar keterwakilannya harus lebih. Suku Marind menuntut harus ada keterwakilan mereka di DPRD Kabupaten Merauke sesuai UU Nomor 21 Tahun 2001, tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua, dimana pada Pasal 28 ayat (3) dijelaskan bahwa rekrutmen politik oleh partai politik di Provinsi Papua dilakukan dengan memprioritaskan masyarakat asli Papua, selain itu pada Pasal 6 ayat (2) Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) terdiri atas anggota yang dipilih dan diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan ayat (4) Jumlah anggota DPRD adalah $1 \frac{1}{4}$ (satu seperempat) kali dari jumlah anggota DPRD Provinsi Papua sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dari kedua ayat tersebut sangat jelas bahwa tidak ada hal yang khusus tentang keberpihakan undang-undang Otonomi Khusus tersebut kepada salah satu suku yang berada di Papua, namun lebih pada secara keseluruhan masyarakat asli Papua.

Hal lainnya bahwa dalam undang-undang No 8 Tahun 2012 tentang pemilihan legislatif, bagian ketiga yaitu jumlah kursi dan daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota, dimana pada pasal 26 ayat (2) yaitu jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah penduduk Kabupaten/Kota yang bersangkutan pada ketentuan. Disini sangat jelas jumlah penduduk disesuaikan dengan alokasi kursi di DPRD. Jumlah penduduk Kabupaten Merauke yang oleh BPS Kabupaten Merauke tahun 2013 sekitar 213.484 jiwa, untuk suku Marind jumlahnya 40.678 jiwa. Hal ini, jika dibagi dengan alokasi kursi di DPRD yang berjumlah 30 kursi untuk Kabupaten Merauke, maka sudah sesuai

dengan jumlah penduduk suku Marind yaitu sekitar 6 kursi di DPRD Kabupaten Merauke.

Harusnya suku Marind mengerti dan memahami bahwa undang-undang otsus tersebut hanya bersifat umum, mengenai keterwakilan mereka ada regulasi yang mengatur tentang keterwakilan tersebut dan mengenai kursi DPRD tidak asal dibagi atau dikasi begitu saja semuanya harus melalui pemilu yang mempunyai mekanisme-mekanisme sendiri. Sesuai dengan regulasi pemilu legislatif No 8 tahun 2012 pasal 26 ayat (2), itu sangat jelas mengenai alokasi jumlah kursi dengan besarnya jumlah penduduk yang ada.

1. Kepentingan

Menurut Pitkin dalam Napitupulu (2007:11) menyatakan bahwa "Proses keterwakilan menyangkut dua hal, yakni keterwakilan dari sisi kepentingan dan keterwakilan dari sisi kebutuhan, yaitu bahwa perwakilan politik mencakup kepuasan pihak terwakili dalam arti kepentingan dan kebutuhan terlayani atau dapat diwujudkan oleh wakilnya melalui tanggapan yang diberikan oleh sang wakil lewat sikap dan tindakannya dalam membuat keputusan atau kebijakan terhadap masalah yang dihadapi oleh masyarakat.

Dari segi kepentingan adalah hal yang penting bagi masyarakat suku Marind adalah pentingnya tingkat kesejahteraan dalam semua akses kehidupan, seperti akses dalam bekerja, kehidupan yang layak, perumahan layak, pendidikan dan lain sebagainya. Masyarakat suku Marind sejauh ini merasa dengan keterwakilan mereka di DPRD tidak banyak membawa perubahan yang diinginkan. Keterwakilan suku Marind di DPRD tidak dapat mengakomodir semua kepentingan dan aspirasi mereka. Padahal terpilihnya wakil-wakil tersebut merupakan amanah dari masyarakat, namun setelah terpilihnya mereka janji-janji yang diucapkan oleh wakil-wakil tersebut tidak dapat ditepati. Sehingga masyarakat suku Marind merasa harusnya keterwakilan mereka dapat memberikan dan mengakomodir semua aspirasi-aspirasi dari masyarakat suku Marind.

2. Kebutuhan

Terkait dengan keterwakilan mereka di DPRD sebagai representatif dari suku Marind, harusnya dapat memberikan rasa kepuasan akan kebutuhan-kebutuhan masyarakat Marind, Pitkin dalam Napitupulu (2007:183) menyatakan bahwa perwakilan politik mencakup kepuasan pihak terwakili dalam kebutuhannya terlayani atau dapat diwujudkan oleh wakilnya melalui tanggapan yang diberikan oleh sang wakil lewat sikap, tindakannya dalam membuat keputusan atau kebijakan terhadap masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Kepuasan tersebut juga sangat diinginkan oleh masyarakat suku Marind terkait dengan kebutuhannya seperti jalan.

Keterwakilan masyarakat suku Marind dalam hal ini sebagai anggota DPRD Kabupaten Merauke, setelah terpilih tidak dapat memberikan sentuhan atau memenuhi aspirasi masyarakat suku Marind. Kebutuhan-kebutuhan suku Marind sejauh ini tidak dapat diakomodir dengan baik oleh wakil-wakil rakyat suku Marind yang berada di lembaga DPRD tersebut, seperti yang diungkapkan oleh beberapa informan bahwa sebagai masyarakat asli Kabupaten Merauke mereka tidak merasakan sentuhan yang diberikan oleh wakil-wakil mereka yang duduk di DPRD. Mereka tidak menuntut untuk harus memenuhi semua yang mereka inginkan, tetapi paling tidak ada sentuhan mereka untuk turun ke masyarakat kira-kira apa yang perlu dari masyarakat.

Implikasi Politik Identitas dan Keterwakilan Suku Marind di DPRD

1. Politik Identitas

Secara nyata dampak dari politik identitas suku Marind telah memberikan sebuah perubahan dari segi politik, dimana politik identitas suku Marind ini berdampak pada perubahan pola pikir suku Marind yang memandang bahwa politik telah merubah kehidupan mereka dan dampaknya sangat jelas bahwa dengan gerakan yang dilakukan oleh suku Marind tersebut banyak orang telah sadar dan mengerti bahwa masyarakat Marind mulai mengerti tentang politik dan terutama tentang hak-hak mereka. Tidak hanya itu, politik identitas suku Marind ini mengakibatkan KPU Kabupaten Merauke untuk mengagendakan dan mengakomodir terbentuknya Daerah Pemilihan (Dapil) baru khususnya masyarakat asli Papua, yang terbagi atas Dapil Merauke I, Dapil Merauke II, Dapil Merauke III, Dapil Merauke IV, dan Dapil Merauke V.

2. Keterwakilan Suku Marind

Keterwakilan politik sebagai hubungan timbal balik antara wakil dan terwakil dapat dikatakan berfungsi apabila kepentingan, kebutuhan dan aspirasi masyarakat terlayani oleh wakil, sehingga masyarakat merasakan keterwakilannya oleh wakil yang dipercayainya. Kondisi tersebut mampu mendorong terwujudnya perwakilan politik yang demokratis. Menurut Pitkin dalam Napitupulu (2007:11) menyatakan bahwa "Proses keterwakilan menyangkut dua hal, yakni keterwakilan dari sisi kepentingan dan keterwakilan dari sisi opini",

Napitupulu (2007:154) memberikan definisi perwakilan politik sebagai berikut: "perwakilan politik berarti bahwa satu atau sejumlah orang yang berwenang membuat keputusan atas nama seseorang, sekelompok orang ataupun keseluruhan anggota masyarakat". Berdasarkan pengertian di atas menjelaskan bahwa perwakilan politik menggambarkan adanya seorang atau sejumlah orang yang memiliki kewenangan dan kekuatan untuk mewakili kepentingan masyarakat dalam setiap pembuatan keputusan dan kebijakan.

Dampak dari keterwakilan suku Marind di DPRD kabupaten Merauke, telah memberikan pengaruh yang besar kepada setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berpihak kepada masyarakat suku Marind, terutama mengenai tuntutan-tuntutan atau aspirasi-aspirasi yang selama ini suku Marind suarakan mulai diakomodir, misalnya mengenai perumahan dan jalan-jalan yang selama ini dituntut oleh masyarakat suku Marind. Perumahan yang dituntut oleh rakyat semuanya telah di kerjakan dan yang lainnya telah dimasukkan ke dalam RAPBD untuk tahun anggaran berikutnya. Jalan-jalan yang dituntut masyarakat Marind tersebut sudah dikerjakan, seperti salah satu ruas jalan yang menghubungkan antara kampung Kumbe dan kampung Domande.

4. Conclusion

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

Politik identitas yang dilakukan oleh suku Marind karena mereka merasa keadaannya semakin sulit didaerahnya sendiri dan banyaknya eksploitasi atas lahan-lahan suku Marind serta atas dasar keyakinan sebagai anak asli dan memiliki wilayah adat. Politik identitas suku Marind terjadi dari aspek kesukuan, Sementara dari aspek

keagamaan dan gender, suku Marind sendiri tidak mempersoalkan hal tersebut. Politik identitas suku Marind terjadi karena ada keterlibatan elite adat dan elite pemerintah yang sengaja memanfaatkan momentum tersebut dan memobilisasi massa untuk melakukan aksi demo yang menuntut hak-hak mereka terkait keterwakilan suku Marind di DPRD Kabupaten Merauke. Sementara Politik identitas suku Marind tidak dipengaruhi oleh elite agama. Perilaku politik suku Marind terjadi karena mereka merasa sebagai suku asli, sehingga mereka menuntut adanya keterwakilan mereka sesuai dengan UU otsus.

Tuntutan mengenai keterwakilan suku Marind di DPRD karena berpatokan pada UU No 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi provinsi Papua, dimana tuntutan suku Marind mengenai pasal 6 ayat 2 dan ayat 4, pasal 38 ayat 3. Keterwakilan suku Marind di DPRD selama ini baik dari kepentingan dan kebutuhannya tidak dapat memberikan harapan, atau tidak dapat memperjuangkan semua aspirasi suku Marind tersebut yang selama ini dituntut, yaitu perumahan dan akses jalan. Dampak dari politik identitas tersebut adalah suku Marind telah mengerti tentang politik serta telah mendorong KPU untuk membentuk daerah pemilihan baru, sehingga terbentuk daerah pemilihan (dapil) baru. Yang lainnya bahwa pemerintah mulai membuka diri dan menerima aspirasi-aspirasi suku Marind. Selain itu dampak dari keterwakilan suku Marind di DPRD Kabupaten Merauke adalah telah terakomodirnya aspirasi-aspirasi masyarakat suku Marind tersebut melalui wakil-wakil mereka di DPRD Kabupaten Merauke. Dan beberapa program yang dilakukan oleh wakil suku Marind seperti ruas jalan yang telah dikerjakan yang menjadi tuntutan suku Marind tersebut

References

Arifin, Zainal. 2012. *Buru Babi: Politik Identitas Laki-Laki Minangkabau*. Humaniora Vol. 24 No. 1.

Bailusy, Muhammad Kausar. *Politik Lokal dalam Sistem Otonomi Daerah*. Mazhab Ciputat, Jakarta, 2012.

Boelaars, J.H.M.C., *Manusia Irian, Dahulu, Sekarang, dan Masa Depan*, Gramedia, 1986.

Bottomoro, T.B. 1985. *Elites and Heterogeneity, A Primitive Theory Social Structure*. New Denzin, Norman K. & Yvanna

Deni, Aji. 2014. *Politik Elit Lokal. Pemilu, Konflik dan Multikulturalisme*. Yogyakarta: Naufan Pustaka Bekerjasama dengan SM.

Fain, Haskell. "Review: Hanna Pitkin's *The Concept of Representation*" *Noûs*, Vol. 14, (1980): 110

Haboddin, Muhtar. 2012. *Menguatnya Politik Identitas di Ranah Lokal*. Jurnal Studi Pemerintahan Vol. 3 No. 1.

Heywood, Andrew. *Political Theory: An Introduction*, Second Edition, Palgrave New York, 1999.

Kambo, Gustiana Anwar. 2015. Etnisitas dalam Otonomi Daerah. *The Politics: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin* Vol. 1 No. 1 (2015).

Keller, Suzanne. 1984. *Penguasa dan Kelompok Elit : Peranan Elit Penentu dalam Masyarakat Modern*. Jakarta: CV Rajawali.

Kholiq, Abdul. 2013. Islam Kalang: Politik Identitas Sub Etnis Jawa. *Harmoni: Jurnal Multikultural dan Multireligius* Vol. 12 No. 1.

Kristianus. 2016. Politik dan Strategi Budaya Etnik dalam Pilkada Serentak di Kalimantan Barat. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review* Vol. 1 No. 1.

Lincoln, S. 1994. Introduction: Entering the Field Qualitative Research dalam *Handbook of Qualitatif Research* diedit oleh Norman K. Denzin dan Y.S. Lincoln. London: Sage Publication.

Maarif, Ahmad Syafii. 2012. *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita*. Jakarta

Setyaningrum, Arie. 2005. "Memetakan Lokasi bagi 'Politik Identitas' dalam Wacana Politik Poskolonial". *Jurnal Mandatory Politik Perlawanan*. Edisi 2 Tahun 2005.

Sosiawaty, Muhammad Kausar Bailusy dan Gustiana Anwar Kambo. 2017. Penguatan Nilai-Nilai Hibua Lamo pada Masyarakat Kabupaten Halmahera. *Kritis: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin* Vol. 3 No. 2 (2017).

Syukur, Abdul. 2011. Islam, Etnisitas dan Politik Identitas: Kasus Sunda. *Miqot: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* Vol. 35 No. 2.

Tanasaldy, Taufiq. *Politik Identitas Etnis di Kalimantan Barat dalam Henk Schulte Nordholt dan Gerry van Klinken (ed.) Politik Lokal di Indonesia*. Jakarta: KITLV-Jakarta.

Ufford, Philip, Quarles Van (ed). 1988. *Kepemimpinan Lokal dan Implementasi Program*. Jakarta: PT Gramedia.

World Commission on the Social Dimension of Globalization. "A Fair Globalization: Creating Opportunities for All", (www.ilo.org/public/english/wcsdg/docs/report.pdf), first published as an ILO publication in February 2004, reprinted in April 2004.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi provinsi Papua

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Legislatif